

Pengaruh Persepsi Karyawan Mengenai Budaya Organisasi dan *Good Corporate Governance* Dalam Pencegahan *Fraud* pada PT. BPR NTB Cabang Lombok Barat

Zakir Firmansyah¹ Susi Retna C²

Universitas Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Indonesia^{1,2}

Email: zakirfirmansyah06@gmail.com¹ susi_retnacahya@unram.ac.id²

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi dan *good corporate governance* dalam pencegahan *fraud* pada PT BPR NTB cabang Lombok Barat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif yang dalam pengumpulan data penelitian menggunakan instrumen kuesioner. Penelitian ini dilakukan pada kantor cabang BPR NTB yang berada di wilayah kabupaten Lombok Barat. Populasi pada penelitian ini adalah semua karyawan BPR NTB kantor cabang Lombok Barat. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik *total sampling* atau sampel jenuh. Sampel yang digunakan pada penelitian ini adalah sebanyak 45 karyawan yang terdiri dari pemimpin cabang, staf dana, staf kredit, analis kredit, FO kredit, AO kredit dan kasir selain satpam dan *cleaning service*. Dalam penelitian ini alat analisis menggunakan *partial least square* (PLS) dengan menggunakan aplikasi *software SmartPLS 4.0*. Hasil analisis pertama menunjukkan bahwa budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. Hasil analisis kedua menunjukkan terdapat pengaruh positif signifikan antara *good corporate governance* terhadap pencegahan *fraud*.

Kata Kunci: Budaya Organisasi, *Good Corporate Governance*, Pencegahan *Fraud*, dan BPR



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Salah satu bank yang ada di Indonesia adalah Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Dasar hukum BPR ada di UU No 10/1998, yang menyatakan bahwa BPR adalah bank yang melakukan kegiatan konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Usaha BPR adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dalam bentuk deposito berjangka, tabungan dan pinjaman terkait Sesuai ketentuan Bank Indonesia. Kegiatan inti dari BPR yaitu melayani usaha kecil dan penduduk pedesaan. Bentuk hukum BPR dapat berupa perseroan terbatas, perseroan daerah, atau koperasi. BPR memiliki kecenderungan lebih beresiko jika dibandingkan dengan Bank Umum karena jumlah BPR secara kuantitas lebih banyak dan dengan permodalan yang lebih terbatas. Beberapa faktor juga mendorong penurunan kinerja pada BPR yang beberapa kasus berujung pada pencabutan izin usaha. BPR yang izin usahanya tercabut bukan hanya karena ketidakmampuan dalam menghadapi persaingan, tetapi tidak jarang juga kehancuran tersebut karena adanya *fraud* yang beberapa diantaranya dilakukan oleh pengurus BPR itu sendiri.

Kepala Eksekutif Pengawasan Perbankan OJK, Tampubolon, menyebutkan bahwa tindak pidana perbankan paling banyak terjadi di Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Sebanyak 80% tindak pidana yang terjadi di BPR membuat banyak BPR di Indonesia harus ditutup setiap tahunnya. Baik OJK maupun Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (Perbarindo) menemukan bahwa sebagian besar BPR yang dicabut izinnya bukan karena kalah bersaing, melainkan karena kecurangan yang dilakukan oleh manajemen BPR (Chandra, 2016).

Menurut Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penipuan atau kejahatan perbankan masih cukup tinggi di Indonesia. Hingga akhir triwulan III-2016, OJK mencatat ada 26 kasus tindak pidana perbankan, yang sebagian besar terjadi pada kasus kredit 55%, rekayasa pencatatan 21%, penggelapan dana 15%, transfer dana 5%, dan pengadaan aset 4%. Selain itu, berdasarkan data dari Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada maret 2021. Melihat bahwa dalam kurung waktu lima tahun terakhir, telah melikuidasi sebanyak 46 entitas Bank Perkreditan Rakyat (BPR) ataupun BPR Syariah (BPRS). Purbaya Yudhi Sadewa selaku ketua dewan komisioner LPS menyatakan bahwa secara rata-rata BPR/BPRS yang dilikuidasi sekitar 8 unit per tahun (Walfajri, 2021).

BPR yang mengalami likuidasi diakibatkan oleh beberapa faktor antara lain perangkapan jabatan pemegang saham dengan dewan direksi, ketidakpatuhan membayar premi, ketidaklengkapan membayar surat pernyataan direksi, ketidaklengkapan surat pernyataan dari pemegang saham, serta kecurangan (*fraud*). *Fraud* dapat diartikan sebagai penipuan atau kecurangan yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan yang berwujud maupun tidak berwujud (material dan non material) (Yurmaini, 2017). Oleh karena itu, diperlukan adanya pencegahan *fraud* untuk meminimalisir terjadinya kecurangan yang ada di BPR. Pencegahan *fraud* ini sangat penting, karena *fraud* bisa menimbulkan kerugian finansial yang besar dan dapat merusak reputasi suatu perusahaan atau organisasi. *Fraud* dapat dilakukan oleh siapa saja, termasuk karyawan, manajemen, kontraktor, atau pihak luar yang berinteraksi dengan perusahaan atau organisasi tersebut. Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya *fraud* antara lain, kesempatan, tekanan, dan rasionalisasi. Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya *fraud* perusahaan atau organisasi harus mengurangi faktor-faktor tersebut dengan melakukan tindakan pencegahan, seperti memperketat pengawasan dan pengendalian internal, memperkuat budaya integritas dan etika kerja yang baik, serta mengedukasi karyawan dan manajemen tentang pentingnya pencegahan *fraud*. Penjelasan ini didukung penelitian sebelumnya oleh Prena & Kusmawan, (2020).

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk pecegahan *fraud* yang adalah dengan membangun budaya organisasi yang kuat dan jujur, serta adanya tata kelola perusahaan yang baik. Membangun budaya organisasi yang transparan yang mengintegrasikan setiap individu ke dalam budaya organisasi untuk menciptakan nilai atau norma positif yang mencegah individu melakukan kecurangan. Budaya kejujuran dan etika yang tinggi dapat mencegah terjadinya kecurangan dalam suatu organisasi. Mengenai tindakan yang dilakukan oleh setiap individu, jika itu dikaitkan dengan teori penalaran moral Kohlberg, teori yang mengungkapkan tingkat penalaran moral seseorang menjadi dasar untuk mengenali kecenderungan orang untuk melakukan tindakan tertentu, terutama yang didasarkan pada masalah etika. milik mereka moralitas ke tingkat argumentasi (Sumendap et al., 2019).

Selain itu, cara untuk mengatasi kecurangan adalah dengan menerapkan tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab (*Good Corporate Governance*). Menurut Peraturan OJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Bank Umum, tata kelola perusahaan yang baik adalah tata kelola bank yang menerapkan beberapa prinsip, antara lain prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, dan independensi. Dengan demikian, kecurangan-kecurangan yang terjadi dapat diminimalisir secara wajar jika perusahaan mengikuti prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*. Penerapan GCG secara konsisten memperkuat posisi kompetitif perusahaan, memaksimalkan nilai perusahaan, mengelola sumber daya dan risiko secara lebih efektif dan efisien, yang pada akhirnya memperkuat kepercayaan pemegang saham dan pemangku kepentingan sehingga dapat beroperasi dan tumbuh secara berkelanjutan dalam jangka panjang. Dalam menjaga tata kelola yang baik, harus didukung oleh budaya organisasi. Budaya organisasi dapat diartikan

sebagai sistem penyebaran keyakinan dan nilai-nilai yang berkembang dalam organisasi dan memandu perilaku para anggotanya.

Penelitian ini dilandaskan pada hasil penelitian sebelumnya yang bervariasi. Suastawan et al., (2017) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*. Sedangkan menurut Sumendap et al., (2019) menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Penelitian mengenai hal ini juga pernah dilakukan oleh Adiko & Astuty, (2019) menyatakan bahwa pengendalian internal dan tata kelola yang baik tidak berpengaruh terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Dan penelitian yang dilakukan oleh Siregar & Hamdani, (2018) juga mengatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh negatif terhadap pencegahan kecurangan (*fraud*). Berdasarkan dari penelitian-penelitian terdahulu yang inkonsisten tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Persepi Karyawan Mengenai Budaya Organisasi Dan *Good Corporate Governance* Dalam Pencegahan Kecurangan (*Fraud*) Pada PT BPR NTB Cabang Lombok Barat”.

Tinjauan Literatur

Penelitian ini menggunakan *Fraud Triangle Theory* sebagai dasar teori utama. Dalam teori segitiga kecurangan, terdapat model segitiga kecurangan yang dibuat untuk menjawab pertanyaan, mengapa orang melakukan kecurangan atau mengapa kecurangan terjadi. Berikut ini adalah tiga elemen yang terdapat dalam teori segitiga kecurangan yang pertama kali diperkenalkan oleh Cressey (1953). *Fraud Triangle Theory* menurut Tuannakota (2010) adalah model yang menjelaskan orang melakukan kecurangan (*fraud*) termasuk korupsi. Konsep segitiga kecurangan ini pertama kali diperkenalkan oleh Donald R. Cressey (1993) dalam disertasinya. Cressey tertarik pada *embezzlers* yang disebutnya sebagai “*trust violators*” atau pelanggar kepercayaan, yakni mereka yang melanggar kepercayaan atau amanah yang dititipkan kepada mereka. Dikaitkan dengan penelitian ini *fraud triangle theory* sangat relevan untuk digunakan karena kecurangan (*fraud*) dapat dipengaruhi oleh adanya peluang, tekanan dan kesempatan untuk melakukan hal tersebut. Dalam hal ini, persepsi karyawan mengenai budaya organisasi yang baik dan penerapan *good corporate governance* diyakini dapat dijadikan sebagai landasan oleh pihak-pihak dalam organisasi untuk menjalankan aktifitas organisasi yang baik dan sehat sehingga hal tersebut dapat mencegah terjadinya kecurangan (*fraud*). Kecurangan (*fraud*) adalah perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh satu orang atau lebih, di dalam atau di luar Perusahaan, dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan/atau golongan apabila perbuatan tersebut merugikan pihak lain

Hubungan Antara Budaya Organisasi dan Pencegahan *Fraud*

Salah satu faktor yang dapat mencegah kecurangan menurut Arens et al. (2012) budaya yang jujur dan etika yang tinggi. Teori arens diperkuat lagi oleh Tunggal Suastawan et al. (2017) menyatakan bahwa *fraud* dapat dicegah dengan meningkatkan budaya organisasi, yang dapat dicapai dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Perbankan bertanggung jawab untuk menerapkan budaya yang baik dalam perusahaan sehingga kecurangan dapat diminimalkan. Dalam *Fraud Triangle Theory* dijelaskan munculnya kecurangan disebabkan oleh tiga faktor. Salah satunya adalah *rationalization* atau pembeneran yaitu budaya yang mengakui dan mentolerir perilaku yang tidak etis dapat menghasilkan pembeneran untuk tindakan kecurangan. Jadi, teori *fraud triangle* menjelaskan bahwa kecurangan terjadi ketika adanya tekanan, peluang, dan pembeneran. Budaya organisasi yang baik dapat membentuk karakter orang untuk tidak melakukan kecurangan dan meningkatkan tanggung jawab terhadap organisasi. Oleh karena

itu, penting bagi organisasi untuk menjaga suasana kontrol dan budaya etis baik untuk mencegah terjadinya *fraud*.

Penelitian Zelmianti & Anita (2015) menunjukkan bahwa perilaku tidak etis berpengaruh positif signifikan terhadap kecenderungan perusahaan melakukan kecurangan (*fraud*). Yang artinya, semakin tinggi budaya organisasi maka akan semakin rendah kesempatan untuk melakukan *fraud*. Selain itu, budaya organisasi yang kuat dapat meminimalisir terjadinya kondisi rasionalisasi yang mendorong adanya *fraud*. Adanya pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* juga didukung oleh penelitian Fitri (2018); Suastawan (2017); Mersa et al (2021); Sumendap et al. (2019); Zelmianti dan Anita (2015); Melati et al. (2022) Agus Sudarma et al. (2019) yang menyatakan bahwa budaya organisasi berpengaruh positif signifikan dengan pencegahan *fraud*. Berdasarkan hal tersebut, peneliti merasa perlu melakukan pengujian kembali mengenai pengaruh budaya organisasi terhadap pencegahan *fraud* untuk memperkuat pendapat-pendapat dari penelitian sebelumnya. Sehingga dirumuskan hipotesis yang diajukan adalah: H1: Budaya organisasi berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

Hubungan Good Corporate Governance Dengan Pencegahan Fraud

GCG adalah pengelolaan bank yang sehat berdasarkan prinsip-prinsip dasar perbankan untuk meningkatkan kinerja bank, melindungi kepentingan stakeholders dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan nilai-nilai etika. GCG juga merupakan suatu tatanan atau sistem pengendalian internal (internal control) suatu perusahaan yang bertujuan untuk mengelola risiko yang signifikan dalam rangka memenuhi tujuan bisnis, dan itu dilakukan dengan cara pengamanan aset dan peningkatan nilai investasi para pemegang saham dalam jangka waktu yang panjang. Dengan penerapan tata kelola (GCG) yang baik, diharapkan perusahaan dapat berjalan dengan baik dan kecurangan yang selama ini merugikan sebagian besar BPR dapat dikurangi atau bahkan dihindari. Penelitian sebelumnya mengatakan bahwa kecurangan dapat diminimalkan dengan menerapkan tata kelola yang baik Sanusi et al. (2020). Secara umum ada tiga alat *anti-fraud*, yaitu tata kelola yang baik (GCG), pengelolaan organisasi yang baik (bersih) dan penerapan pengendalian intern. Dari sini dapat disimpulkan bahwa tingkat pencegahan penipuan tergantung pada bagaimana lembaga atau perusahaan menangani tata kelola perusahaan yang bertanggung jawab. Transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, kesetaraan dan kewajaran merupakan prinsip korporasi yang baik yang memiliki hubungan sebab akibat. Penerapannya harus konsisten atau sesuai dengan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Jika salah satu prinsip tata kelola yang baik tidak berjalan atau tidak dilaksanakan, dapat disimpulkan bahwa pencegahan kecurangan tidak optimal.

Dalam *Fraud Triangle Theory*, *Good Corporate Governnce* (GCG) dapat mempengaruhi 3 komponen yaitu tekanan, kesempatan dan rasionalisasi. GCG dapat mempengaruhi pengendalian internal organisasi, yang merupakan salah satu cara untuk mencegah *fraud*. Pengendalian internal yang baik dapat mempengaruhi kesempatan untuk melakukan *fraud*. GCG juga menekankan kepentingan pentingnya etika dan integritas dalam bisnis. Komitmen terhadap etika dapat mempengaruhi rasionalisasi dari pelaku kecurangan dan mencegah terjadinya *fraud*. Selain itu, GCG juga menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam bisnis. Transparansi dan akuntabilitas dapat meminimalisir tekanan untuk tujuan yang tidak realistis dan mencegah terjadinya *fraud*. Penelitian Arthana dan Rowa (2019) menunjukkan bahwa *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. Dari hasil penelitian tersebut dapat disimpulkan bahwa GCG berperan penting dalam pencegahan *fraud* dan dapat mempengaruhi 3 komponen dari *Fraud Triangle*

Theory dengan baik. Oleh karena itu, perusahaan perlu menerapkan GCG dengan baik untuk mencegah terjadinya *fraud*. Adanya pengaruh GCG terhadap *fraud* juga didukung oleh penelitian dari Kurniawan dan Izzaty (2019); Jannah (2016); Farochi dan Nugroho (2018); Achmad Ali Fikri, Syamsul Arifin (2022); Elvy et al. (2022) Lisdiono et al. (2023); Rustandy dan Citra Sukmadilaga (2020); Chaoul (2016) yang menyatakan bahwa *good corporate governance* berpengaruh positif terhadap pencegahan *fraud*. H2: Good Corporate Governance berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud*.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian asosiatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian asosiasi adalah penelitian yang menjelaskan hubungan sebab akibat antara dua variabel atau lebih. Pendekatan kuantitatif atau paradigma kuantitatif disebut juga dengan pendekatan tradisional (*traditional*), positivis (*positivist*), eksperimental (*experimental*), atau empiris (*empiricist*) merupakan penelitian yang menekankan pada pengujian teori-teori melalui pengukuran variabel-variabel penelitian dengan angka dan melakukan analisis data dengan prosedur statistic Indriantoro et al. (2018). Dalam penelitian ini hubungan sebab akibat yang diteliti yaitu variabel independen (sebab) yaitu Budaya Organisasi dan *Good Corporate Governance* serta dependen (akibat) yaitu Pencegahan Kecurangan (*fraud*). Populasi adalah sekelompok orang, peristiwa atau apapun yang memiliki karakteristik tertentu Indriantoro et al. (2018). Populasi pada penelitian ini adalah semua karyawan yang ada di BPR NTB cabang Lombok Barat kecuali satpam dan *cleaning service*. Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan teknik total sampling. Menurut Soegiyono (2011) metode penentuan sampel jenuh atau total sampling adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini melalui pengisian kuesioner, dimana data dari hasil penelitian ini hanya terfokus pada hasil jawaban pernyataan yang diisi pengisian kuesioner oleh responden. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif. Data kuantitatif adalah data berbentuk angka, mulai dari pengumpulan data, penafsiran terhadap data, serta hasilnya berbentuk angka. Sumber data pada penelitian ini adalah data primer. Pendapat dan persepsi dari karyawan BPR yang disebar secara langsung melalui kuesioner dan diisi oleh responden. Kuesioner yang disebar berisi pertanyaan mengenai pengaruh persepsi karyawan mengenai Budaya Organisasi dan Tata Kelola Perusahaan terhadap pencegahan *fraud*. Data yang telah direpson oleh subjek penelitian, kemudian digunakan untuk melakukan analisis data. Dalam penelitian ini pengukuran masing-masing indikator menggunakan skala *likert*. Variabel Penelitian, Variabel independen: Budaya Organisasi (X1), *Good Corporate Governance* (X2), Variabel dependen: Pencegahan *Fraud* (Y)

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, untuk menguji hipotesis alat analisis yang digunakan adalah teknik *Partial Least Square* (PLS) dengan menggunakan aplikasi *software SmartPLS 4.0*. *Partial Least Square* (PLS) merupakan analisis persamaan *Structural Equation Model* (SEM) berbasis varian yang secara simultan dapat melakukan pengujian model pengukuran sekaligus pengujian model struktural. Model pengukuran digunakan untuk uji validitas dan reliabilitas, sedangkan model struktural digunakan untuk uji kausalitas atau pengujian hipotesis dengan model prediksi Abdillah dan Jogiyanto (2015). Analisis data menggunakan PLS memiliki keunggulan, yaitu informasi yang dihasilkan efisien dan mudah diinterpretasikan terutama pada model yang kompleks atau hipotesis model, dapat digunakan pada data set yang kecil, tidak

mensyaratkan asumsi normalitas, linearitas, dan heteroskedastisitas serta dapat digunakan pada indikator yang bersifat reflektif dan formatif terhadap variabel latennya (Abdillah dan Jogiyanto, 2015). Ukuran sampel penelitian ini juga cukup kecil, sehingga sesuai dengan ukuran sampel pada PLS yang dapat dijalankan pada sampel kecil.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kuesioner yang berhasil disebar, karakteristik dari responden dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1. Karakteristik Responden

Keterangan	Total	Presentasi
Kantor Cabang:		
- Gunung Sari	8	100%
- Labuapi	7	100%
- Narmada	10	100%
- Kuripan	8	100%
- Gerung	12	100%
Jenis kelamin:		
- Laki laki	22	48,88%
- Perempuan	23	51,11%
Umur:		
- <20 tahun	0	
- 20-30 tahun	9	20%
- 31-40 tahun	11	24,44%
- 41-50 tahun	14	31,11%
- 51-60 tahun	11	24,44%

Sumber: Data primer diolah 2023

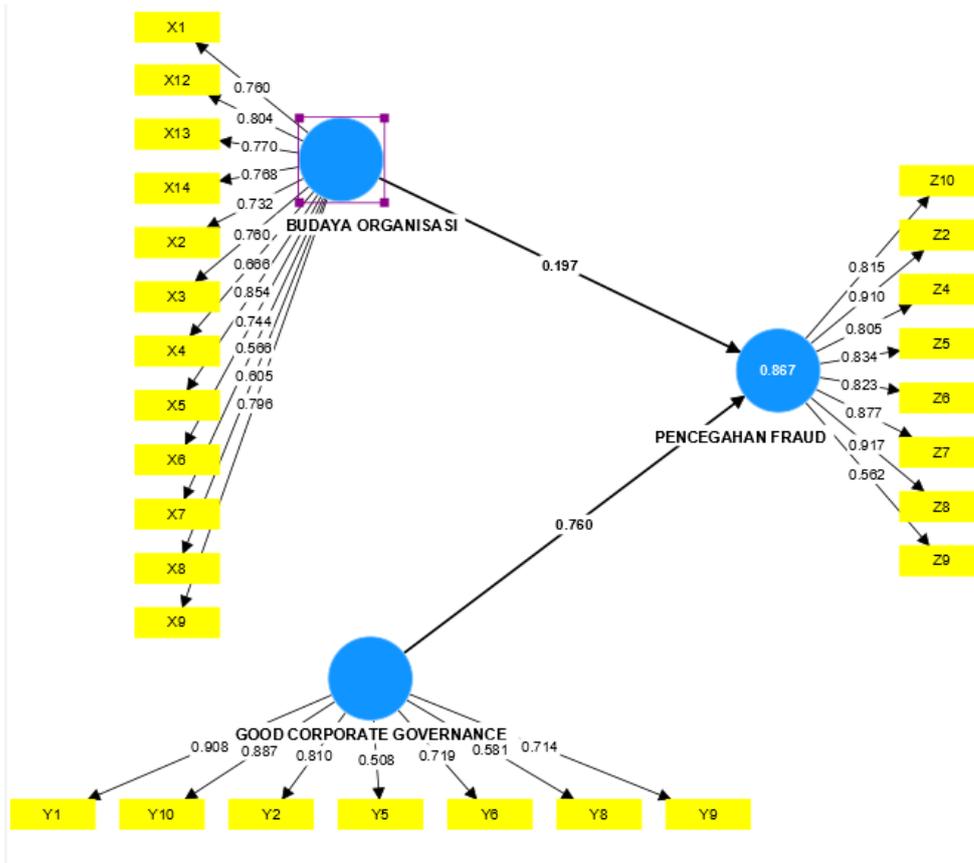
Berdasarkan tabel 1 dapat dilihat jumlah karyawan yang dijadikan sampel berdasarkan tempat yaitu 8 orang atau 100% KC Gunung Sari, 7 orang atau 100% KC Labuapi, 10 orang atau 100% KC Narmada, 8 orang atau 100% KC Kuripan, dan 12 orang atau 100% KC Gerung. Selain itu sebanyak 23 responden atau 51,1% responden didominasi oleh perempuan dan sisanya 22 karyawan atau 48,8% berjenis kelamin laki-laki. Untuk usia responden didominasi oleh usia 41-50 tahun yakni sebanyak 14 karyawan dengan persentase 31,11% sisanya, sebanyak 11 orang atau 24,4% berusia 51-60 tahun, 11 orang atau 24,4% berusia 31-40 tahun, dan 9 orang atau 20% berusia 20-30 tahun.

Analisis Data

Uji Validitas

Validitas Konvergen

Uji validitas konvergen dalam PLS dengan indikator reflektif dinilai berdasarkan *loading factor* (korelasi antara skor item/skor komponen dengan skor konstruk) indikator-indikator yang mengukur konstruk tersebut. Semakin tinggi nilai *factor loading*, maka semakin penting peranan *loading* dalam menginterpretasi matrik faktor. *Rule of thumb* yang biasanya digunakan untuk mengukur validitas konvergen adalah *outer loading* > 0,7. Namun menurut Chin (1998), nilai *loading factor* 0,5 - 0,6 masih dianggap cukup (Ghozali, 2015).



Gambar 1. Model Struktural Setelah Eliminasi

Sumber: Data Primer Diolah 2023

Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dapat dilihat dari nilai Cronbach's alpha dan Composite Reliability. Untuk dapat dikatakan konstruk reliabel, Cronbach's alpha harus $> 0,6$ dan reliabilitas komposit harus $> 0,7$. Berdasarkan data yang diperoleh dari responden melalui kuesioner, telah dilakukan pengolahan data keluar melalui PLS sesuai dengan prosedur pengolahan data, sehingga diperoleh hasil pada tabel 2 di bawah.

Tabel 2. Result for Inner Weight Path Coefficient (Mean, STDEV, T-Values)

Konstruk	Original Sample (O)	Sample Mean (M)	Standard Deviation (STDEV)	T Statistics (O/STDEV)	P Values	T Table	Hipotesis	Keterangan
Budaya Organisasi -> Pencegahan Fraud	0.197	0.216	0.114	1.735	0.083	1,68	H1	Ditolak
Good Corporate Governance -> Pencegahan Fraud	0.760	0.752	0.106	7.200	0.000	1,68	H2	Diterima

KESIMPULAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh budaya organisasi, *good corporate governnce* terhadap pencegahan *fraud* pada BPR NTB Lombok Barat. Pengujian dilakukan dengan menggunakan analisis *Partial Least Square (PLS)*. Berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan pada bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa: Budaya organisasi tidak berpengaruh terhadap pencegahan *fraud* pada BPR NTB cabang Lombok Barat. Hal ini menunjukkan bahwa inovasi dan pengambilan resiko, perhatian terhadap hal rinci, orientasi hasil, orientasi orang, orientasi tim, keagresifan, dan kemantapan/kemahiran tidak

berpengaruh terhadap pencegahan *fraud*. *Good corporate governance* berpengaruh positif signifikan terhadap pencegahan *fraud* pada BPR NTB cabang Lombok Barat. Hal ini menunjukkan bahwa variabel dalam *good corporate governnce* memiliki peran dalam pencegahan *fraud*.

Keterbatasan penelitian ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan bagi peneliti selanjutnya. Keterbatasan yang dihadapi dalam penelitian ini antara lain: Sampel yang digunakan pada penelitian ini hanya pada kantor cabang Lombok Barat. sehingga kemungkinan hasil yang diperoleh akan berbeda jika penelitian dilakukan di tempat lain. Oleh karena itu, peneliti berikutnya diharapkan menggunakan sampel yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei melalui pengisian kuesioner, sehingga data hasil penelitian hanya terfokus pada pernyataan atas hasil pengisian kuesioner oleh responden yang tidak memberikan penjelasan terhadap pernyataan tersebut. Oleh karena itu, bagi peneliti selanjutnya diharapkan tidak hanya menggunakan kuesioner saja melainkan juga dapat menggunakan wawancara dan observasi sehingga mendapatkan hasil penelitian yang lebih jelas. Variabel dalam penelitian ini terbatas pada budaya organisasi, dan *good corporate governance* sehingga penelitian ini perlu dikembangkan agar lebih mendalam, salah satunya dengan menambahkan variabel-variabel lainnya yang dapat memengaruhi pencegahan *fraud* seperti; pengendalian internal dan lain-lain.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdillah, W., dan Jogiyanto, H. . (2015). *Partial Least Square (PLS) Alternatif Structural Equation Modeling (SEM) dalam penelitian bisnis*. ANDI.
- Adiko, R. G., & Astuty, W. (2019). *Pengaruh Pengendalian Intern , Etika Auditor , Dan Good Corporate Governance Terhadap Pencegahan Fraud PT*. INALUM. 2(1), 52–68.
- Arens, A. A., Beasley, M. S., & Elder, R. J. (2012). *Auditing and assurance services : an integrated approach* (14th ed.). Upper Saddle River, New Jersey : Pearson Education International.
- Chandra, A. A. (2016). *Dalam 9 Bulan di 2016, Ada 26 Kasus Pidana Perbankan di RI*. Detikfinance.
- Indriantoro, Nur, Supomo, B. (2018). *Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen*. ANDI Yogyakarta.
- Prena, G. Das, & Kusmawan, R. M. (2020). Faktor-faktor Pendukung Pencegahan Fraud pada Bank Perkreditan Rakyat. *Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(1), 84.
- Sanusi, S. F., Sutrisno, S., & Suwiryono, D. H. (2020). Pengaruh Corporate Governance dan Kualitas Audit terhadap Pencegahan Kecurangan. *Kompartemen: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 17(1), 61–68. <https://doi.org/10.30595/kompartemen.v17i1.4997>
- Siregar, M. I., & Hamdani, M. (2018). Pengaruh Kesesuaian Kompensasi, Keefektifan Sistem Pengendalian Internal, Budaya Organisasi, dan Kompensasi Terhadap Fraud (Studi pada Satuan Kerja Vertikal Kementerian Keuangan Provinsi Lampung). *Jurnal Ekonomi Global Masa Kini Mandiri*, Vol. 9(No. 1), Edisi Juli.
- Soegiyono. (2011). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*.
- Suastawan, I, Sujana, S. E. E., & ... (2017). Pengaruh Budaya Organisasi, Proactive Fraud Audit, Dan Whistleblowing Terhadap Pencegahan Kecurangan Dalam Pengelolaan Dana Bos (Studi Empiris Pada *JIMAT (Jurnal ...)*, 1(3).
- Sumendap, P., Hidayat, W. hidayat, Prabowo, A., Hartono, H., Sartika, S., Sari, R. K., Wahyuningrum, F., & Umar, H. (2019). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Moralitas Individu Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. *Prosiding Seminar Nasional Pakar*, 2, 1–9.
- Walfajri, M. (2021). *Hingga Maret 2021, LPS sudah melikuidasi 46 BPR/BPRS*. KONTAN.CO.ID.

- Yurmaini. (2017). Kecurangan Akuntansi (Fraud Accounting) Dalam Perspektif Islam. *Jurnal Akuntansi Dan Bisnis*, 3(1), 93–104.
- Zelmiyanti, R., & Anita, L. (2015). Pengaruh Budaya Organisasi Dan Peran Auditor Internal Terhadap Pencegahan Kecurangan Dengan Pelaksanaan Sistem Pengendalian Internal Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Akuntansi Keuangan Dan Bisnis*, 8(10), 67–76.